

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN  
SAMPAI MELEBIHI TENGGANG WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2004**



**Disusun Oleh:  
MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 12216013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

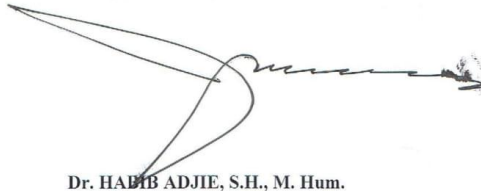
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 23 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
UniversitasNarotama



Dr. HADIB ADJIE, S.H., M. Hum.

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, serta mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum penelitian ini dengan cara mempelajari dan menelaah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menganalisis serta menyimpulkan isu hukum yang dikemukakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang secara jelas bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang mengakibatkan adanya konflik norma dan tidak sesuai dengan alasan atau tujuan umum dari peraturan hukum tersebut, sesuai peraturan yang tertinggi tentu saja segala bentuk kegiatan yayasan dianggap ilegal dan aktanya batal demi hukum. Lalu mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian ini mengakibatkan yayasan yang bersangkutan dapat dibubarkan jika dibuat berdasarkan peraturan yang lebih rendah derajatnya yang sama saja bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena aktanya mengalami cacat hukum.

Kata Kunci: Ratio Legis, Yayasan, Undang-undang



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi .....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Originalitas Penelitian .....	10
1.6. Tinjauan Pustaka .....	13
1.7. Metode Penelitian .....	27
1.8. Sistematika Penulisan .....	31

### **BAB II RATIO LEGIS KETENTUAN PASAL 15A**

#### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013**

##### 2.1. Asas Hukum yang Dilandasi Ketentuan Pasal 15A

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 .....	33
---	----

##### 2.2. Tujuan Umum Keadilan, Kepastian Hukum dan

Kemanfaatan.....	51
2.3. Sifat <i>Dwingend Recht</i> Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang	
Nomor 28 Tahun 2004 .....	62
<b>BAB 3 AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN YAYASAN YANG</b>	
<b>BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN</b>	
3.1. Akibat Hukum Ketentuan Pasal 15A PP Nomor 2 Tahun	
2013 dikaitkan dengan Pasal 71 UU Yayasan.....	66
3.2. Akibat Hukum Atas Tindakan Yayasan yang Belum	
Melakukan Penyesuaian .....	76
3.3 Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Pada Badan	
Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan .....	90
4.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut

1. Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yang terdapat konflik norma dengan pasal 71 Undang-undang yayasan adalah terkait dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
  - Asas keadilan, yaitu asas yang memberikan keadilan bagi yayasan yang belum sempat mendaftarkan dan melakukan penyesuaian.
  - Asas kemanfaatan, yaitu asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian atau perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian.
  - Asas kepastian hukum, yaitu asas yang memberikan yayasan memperoleh status badan hukum dan tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum
2. Akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang yayasan dianggap mati karena melampaui batas tenggang waktu penyesuaian, akta yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum karena akta tersebut cacat hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005

Ahmad Zainal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim : Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2014.

Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum, KOnstitusi dan Mahkamah Agung*, Setara Press, Malang, 2013.

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, : Eksistensi Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana , Jakarta, 2010.

Algra, dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983,

Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2012,

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke -6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1982

Arie Kusmastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003

Attamini hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta

Budi Agus Riswadi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Bryan A. Gamer, *Black Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, St. Paul, United States of Amerika, 1999.

Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Estelle Phillips, *Researching and Writing Law*, Lawbook, Sidney, 2002

- E. Fernando Manullang, *Lagisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta 2016,
- Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- I.P.M Ranuhandoko B.A. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publising, Malang 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
- Maria Farida Indarti Suprpto, *Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002,
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan oleh M. Isa Aris, Intermassa, Jakarta. 1979
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Sixth Edition, Barron's Educational Series. Inc, New York, 2010.



Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.85 dalam Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnaen, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yappika, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 1999

W. Friedmann, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum)*, *Susunan I, II, dan III*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan

## **C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah**

Basuki Juni Nugraha, “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang - Undang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Doden Almury BJ, “Upaya Penyesuaian Yayasan Lama Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Terhadap Yayasan Yang Ada Di Kota Singkawang (Studi Kasus Pada Yayasan Dharma Persada)”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005

Mozedayen Eirene Alfalande, “Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Terhadap Yayasan-Yayasan Sosial Yang Telah Berdir” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006

Rusdianto S, “Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Istimewa”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

